

**PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN  
OBJEK WISATA TELAGA JONGE PACAREJO KECAMATAN SEMANU  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Verena Suci Kurniati, Endang Larasati Setianingsih**

Program Studi S1 Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405  
Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

**ABSTRACT**

*The development of Telaga Jonge tourist attraction in Pacarejo, Semanu District, Gunungkidul Regency involves Jonge Raya Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Pacarejo Village Government, Gunungkidul Tourism Office, local communities, and local businesses. This research is motivated by the great potential of Telaga Jonge tourism but has not been optimally developed, as well as the existence of conflicts related to management. This research uses Ansell and Gash's collaborative governance theory with the research objective to analyze the collaborative governance process in Telaga Jonge and identify the factors that drive and hinder the process. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the collaborative governance process in Telaga Jonge is still in its early stages and has not yet run effectively. The main challenge lies in building trust and mutual understanding among the actors involved. Weak institutional design, lack of transparency, and differences in perceptions of tourism potential ownership are the main inhibiting factors.*

**Keywords:** *Collaborative Governance, Tourism Development, Telaga Jonge, Sustainable Tourism.*

## ABSTRAK

Pengembangan objek wisata Telaga Jonge di Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul melibatkan Pokdarwis Jonge Raya, Pemerintah Desa Pacarejo, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, masyarakat, dan pelaku usaha lokal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi wisata Telaga Jonge yang besar namun belum tergarap secara optimal, serta adanya konflik terkait pengelolaan. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash dengan tujuan penelitian untuk menganalisis proses *collaborative governance* di Telaga Jonge dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* di Telaga Jonge belum masih dalam tahap awal dan belum berjalan secara efektif. Tantangan utama terletak pada membangun kepercayaan dan pemahaman bersama di antara para aktor yang terlibat. Desain institusional yang lemah, kurangnya transparansi, dan perbedaan persepsi tentang kepemilikan potensi wisata menjadi faktor penghambat utama.

**Kata kunci:** *collaborative governance, pengembangan pariwisata, pariwisata berkelanjutan, Telaga Jonge.*

## Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa kepariwisataan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana, dan bertanggung jawab untuk mendukung pelestarian sumber daya alam dan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keindahan alam yang beragam, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata. Bahkan, lembaga analisis survei asal Inggris, Money.co.uk, menobatkan Indonesia sebagai negara terindah di dunia dengan skor 7,77 pada tahun 2022.

Salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata, DIY menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Kabupaten Gunungkidul, yang terletak di DIY, turut menyumbang daya tarik wisata dengan keindahan pantai, goa alami, dan budaya lokal yang kaya. Dalam sepuluh tahun terakhir, Gunungkidul mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan, mencatat

pertumbuhan rata-rata 18,9% dari tahun 2011 hingga 2019. Salah satu destinasi wisata yang potensial di wilayah ini adalah Telaga Jonge, yang terletak di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu.

Telaga Jonge dikenal karena keunikan alamnya, seperti air telaga yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang. Destinasi ini juga menawarkan berbagai atraksi, termasuk wahana kano, perahu, sepeda klasik, serta pasar digital yang menyajikan kuliner tradisional dan kesenian lokal. Namun, meskipun memiliki potensi wisata yang besar, pengelolaan Telaga Jonge masih menghadapi berbagai tantangan. Konflik antara pemangku kepentingan, kurangnya keterlibatan pemerintah desa, serta strategi promosi yang belum optimal menjadi masalah utama yang menghambat pengembangan objek wisata ini.

Pengelolaan Telaga Jonge melibatkan berbagai pihak, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pemerintah desa, masyarakat setempat, dan pelaku usaha lokal. Namun, ketidakharmonisan antara pihak-pihak ini seringkali memicu konflik, terutama terkait pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*). Pokdarwis, yang memiliki peran dominan, dinilai menjalankan praktik pengelolaan yang

eksklusif, sehingga mengabaikan peran pemerintah desa dan hak masyarakat lokal. Selain itu, kelemahan dalam desain tata kelola, seperti kurangnya transparansi dan tidak adanya mekanisme partisipasi yang inklusif, semakin memperburuk situasi.

Strategi promosi Telaga Jonge juga belum optimal. Media sosial, seperti Instagram, yang digunakan oleh Pokdarwis, dikelola secara sporadis dan tidak konsisten. Hal ini berdampak pada rendahnya daya tarik wisatawan, terutama dari kalangan mancanegara. Selain itu, kontribusi wisata terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kesejahteraan masyarakat lokal masih minim, meskipun jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2022 setelah pandemi COVID-19.

**Tabel 1**

**Jumlah Kunjungan Wisatawan Telaga Jonge**

TAHUN	JUMLAH (ORANG)
2017	70.657
2018	68.563
2019	63.624
2020	30.112
2021	48.367
2022	60.739
<b>JUMLAH</b>	<b>342.062</b>

Sumber: Kelompok Usaha Pariwisata Telaga Jonge, 2023

Dalam konteks ini, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan untuk mengatasi permasalahan yang kompleks tersebut. Menurut Ansell dan Gash (2007), *collaborative governance* adalah mekanisme tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama di antara para aktor, sehingga dapat menciptakan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pariwisata dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan Telaga Jonge dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta penghambatnya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata, memperkuat tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan, serta memberikan kontribusi terhadap teori dan praktik dalam pengembangan pariwisata berbasis kolaborasi. Dengan demikian, penelitian ini

dapat menjadi referensi bagi pengembangan destinasi wisata lain yang menghadapi tantangan serupa.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Telaga Jonge. Lokasi penelitian adalah Telaga Jonge, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, yang dipilih karena memiliki potensi wisata besar namun menghadapi tantangan tata kelola yang kompleks. Teknik pemilihan informan melalui *purposive sampling* dengan subjek penelitian meliputi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Jonge Raya, pemerintah desa Pacarejo, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, masyarakat lokal, dan pelaku usaha. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber. Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan wawasan komprehensif mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat *collaborative governance*, serta rekomendasi strategis untuk tata

kelola pariwisata yang berkelanjutan di Telaga Jonge.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini mengungkapkan proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan teori Ansell dan Gash (2008), proses ini melibatkan tahapan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara.

#### **1. Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Objek Wisata Telaga Jonge**

##### **a) Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*)**

Dialog tatap muka menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi. Pada pengembangan Telaga Jonge, dialog dilakukan sejak tahun 2016 melalui koordinasi antara pemerintah desa, Pokdarwis Jonge Raya, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, dan pelaku usaha lokal. Dialog ini berfokus pada pengembangan potensi wisata, pemanfaatan dana desa, dan pembangunan infrastruktur seperti *jogging track* dan gazebo. Namun, dialog ini hanya dilakukan sesekali tanpa jadwal pertemuan rutin, sehingga efektivitas komunikasi menjadi

terbatas. Keberhasilan tahap ini terlihat dari adanya forum komunikasi yang dapat menyelesaikan permasalahan sementara dalam pengelolaan wisata.

**b) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)**

Membangun kepercayaan menjadi tantangan dalam pengelolaan Telaga Jonge. Pemerintah Desa Pacarejo menganggap Pokdarwis Jonge Raya kurang transparan dalam pengelolaan dana dan hasil pengelolaan wisata. Persepsi berbeda mengenai kepemilikan potensi wisata, Pokdarwis menganggap potensi wisata adalah milik kelompok, sementara pemerintah desa menilai potensi tersebut harus dikelola untuk kepentingan wilayah secara umum. Minimnya komunikasi yang terstruktur dan transparansi informasi menghambat pembentukan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

**c) Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*)**

Komitmen dalam kolaborasi merupakan elemen yang sangat penting. Dorongan untuk terlibat dalam kolaborasi berasal dari komitmen. Komitmen menunjukkan kesungguhan setiap pemangku kepentingan dalam menjalankan kolaborasi, sehingga menjaga komitmen dari berbagai pihak menjadi hal yang krusial sebagai

landasan untuk mencapai tujuan bersama. Komitmen untuk mengembangkan Telaga Jonge ditunjukkan oleh berbagai aktor. Pemerintah Desa Pacarejo memiliki komitmen dengan adanya draft Perdes pungutan yang bertujuan untuk mengatur pungutan di Telaga Jonge. Pokdarwis juga menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan Telaga Jonge dengan melakukan berbagai upaya, seperti promosi melalui media sosial dan membangun hubungan dengan pelaku wisata. Begitu pula dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen untuk membina dan melatih Pokdarwis Jonge Raya agar dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan wisata sehingga nantinya para pelaku usaha di Telaga Jonge juga semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik Pokdarwis Jonge Raya, Pemerintah Desa Pacarejo, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, maupun masyarakat sekitar memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan Telaga Jonge wadah bagi pemberdayaan masyarakat, meskipun dalam proses membangun kepercayaan tidak berhasil. Namun demikian, antar pihak tidak melakukan ketepatan dalam menjalankan tugas dan komitmen masing-masing. Seperti

Pemerintah Desa yang tak kunjung melaksanakan peraturan pungutan di Telaga Jonge. Kemudian Dinas Pariwisata yang jarang memberikan pelatihan, sekitar tiga bulan sekali dan itupun hanya dihadiri oleh perwakilan Pokdarwis saja. Serta Pokdarwis Jonge Raya yang belum melakukan promosi wisata dengan maksimal.

**d) Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)**

Kolaborasi yang sukses membutuhkan pemahaman bersama di antara para pihak yang terlibat. Artinya, semua pihak harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama, yang dicapai melalui penyatuan pemikiran dan keselarasan tujuan. Pemahaman bersama ini penting untuk mengurangi potensi kesalahpahaman dan mendorong kesepakatan bersama dalam memahami dan mendefinisikan masalah. Namun, dalam kasus Telaga Jonge terdapat perbedaan persepsi antara Pemerintah Desa Pacarejo yang fokus pada pemerataan pengembangan potensi wisata di seluruh wilayah Pacarejo, sementara Pokdarwis menilai perhatian pemerintah desa terhadap Telaga Jonge kurang maksimal. Selain itu, kurangnya visi bersama. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan program. Perbedaan persepsi dan prioritas pengelolaan

menjadi penghambat utama dalam membangun pemahaman bersama.

**e) Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)**

Pada tahap ini, capaian sementara yang dihasilkan dari proses kolaborasi memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan dan penguatan komitmen dari semua aktor yang terlibat. Pengelolaan Telaga Jonge telah memberikan dampak positif sebagai wadah pemberdayaan masyarakat lokal melalui penyerapan UMKM, sebagian besar pelaku usaha di Telaga Jonge berasal dari masyarakat sekitar. Selain itu, juga melalui kontribusi ekonomi lokal, Telaga Jonge menjadi sumber penghasilan tambahan bagi warga melalui aktivitas wisata dan kuliner. Namun, para pihak yang terlibat belum merasa puas dan merasa masih perlu ditingkatkan lagi dalam pengembangannya.

Gambar 2 UMKM Pasar Digital Telaga Jonge



Sumber: Dokumentasi peneliti

## 2. Faktor Pendorong dan Penghambat Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Objek Wisata Telaga Jonge

### a) Kondisi Awal

Dalam kondisi awal menunjukkan sudah adanya pembentukan relasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Para pihak di kondisi awal memiliki visi dan misi yang sama menjadikan Telaga Jonge wadah pemberdayaan masyarakat. Serta adanya faktor pendorong bagi para aktor untuk ikut serta dalam kolaborasi ini karena melihat potensi Telaga Jonge yang besar tetapi belum tergarap secara maksimal.

### b) Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan dalam pengelolaan Telaga Jonge berperan penting untuk menjaga koordinasi antara berbagai pihak. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul memberikan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi kelompok. Sedangkan Kepala Desa Pacarejo menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi yang erat untuk mencapai tujuan bersama.

### c) Desain Institusional

Desain Institusional merupakan aturan dasar yang dibuat sejak awal

pembentukan kelompok sadar wisata untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan. Aturan dasar juga mencakup pembatasan untuk menjaga fokus pada komunitas lokal, seperti pelarangan pedagang dari luar wilayah tanpa izin. Namun, belum adanya penetapan aturan dasar untuk semua pihak yang berkolaborasi serta belum adanya keterbukaan atau transparansi dalam proses kolaborasi menjadi penghambat proses kolaborasi.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge. Proses kolaborasi ini tidak berjalan dengan baik karena keberhasilan proses hanya sampai di tahap awal yaitu tahap dialog tatap muka, yang menjadi landasan untuk membangun kesepakatan kerja sama antara berbagai pihak, seperti Pokdarwis, Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata, dan pelaku usaha. Selanjutnya, di tahap membangun kepercayaan terdapat kendala, seperti kurangnya transparansi informasi dan perbedaan persepsi tentang kepemilikan bersama potensi wisata. Sehingga sebagai sebuah proses, tahap-

tahap proses kolaborasi selanjutnya yaitu komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara juga menjadi terkendala.

Faktor pendukung dalam kolaborasi ini meliputi kondisi awal dan kepemimpinan fasilitati. Dimana dalam kondisi awal sudah adanya pembentukan relasi antara pihak Pemerintah Desa Pacarejo, Pokdarwis, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dan juga masyarakat sekitar. Sudah ada pula pembentukan tujuan bersama antar para aktor. Para pihak pun memiliki faktor pendukung masing-masing untuk ikut serta dalam kolaborasi ini. Selain itu, juga didukung kepemimpinan fasilitatif yang memberikan bimbingan dan juga pelatihan kepada pengelola. Akan tetapi, dalam desain institusional menjadi faktor penghambat karena belum adanya penetapan aturan dasar serta keterbukaan atau transparansi dalam proses kolaborasi.

### **Saran**

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge.

- 1) Menetapkan aturan dasar yang jelas dan disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat. Aturan ini harus mencakup pembagian peran dan

tanggung jawab, transparansi keuangan, sistem pengambilan keputusan, aturan penggunaan fasilitas, dan mekanisme penyelesaian konflik.

- 2) Meningkatkan transparansi informasi dan komunikasi di antara semua pihak melalui rapat rutin dan terbuka, laporan berkala, dan platform informasi yang mudah diakses.
- 3) Menghilangkan persepsi negatif yang mungkin ada dan membangun kepercayaan melalui tindakan nyata yang menunjukkan bahwa semua pihak memiliki kepentingan yang sama dalam pengembangan Telaga Jonge.
- 4) Meningkatkan kapasitas Pokdarwis melalui pelatihan yang lebih terarah dan berkelanjutan, serta membentuk tim koordinasi yang terdiri dari perwakilan dari semua pihak untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam pengelolaan Telaga Jonge

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Angela, V. F. (2023). Strategi Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Konservasi Alam Danau Tahai. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 984-993.

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Departemen Adimistrasi Publik Undip Press.
- Aulia, F., Bekti, H., & Susanti, E. (2021). Kolaborasi Pembangunan Kepariwisata di Desa Wisata Kubu Gadang. (*JANE*) *Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 108-114.
- Bichler, B., & Lössch, M. (2019). Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights into a Community Oriented Destination. *Sustainability*.
- Candra, Y., Wulandari, I., Budiantara, M., & Airawaty, D. (2022). Service Community Collaboration: Peningkatan Minat Kunjungan Wisatawan Telaga Jonge Gunung Kidul Melalui Digital Marketing. *JURNAL ABDIMAS BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 221-230.
- Chandler, R. C., & J., C. P. (1988). *The Public Administration Dictionary*. Santa Barbara: CA: ABC-CLIO Inc.
- Creswell, J. (2013). Steps in conducting a scholarly mixed methods study.
- detiktravel. (2021). *Telaga Jonge, Destinasi Jogja yang Tak Pernah Kering Airnya*. travel.detik.com. Retrieved from <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5850628/telaga-jonge-destinasi-jogja-yang-tak-never-dry-again>
- Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. (2020). *Desa Wisata Pacarejo*. Retrieved from Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Website: <https://wisata.gunungkidulkab.go.id/desa-wisata-pacarejo/>
- Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. (2022). *Jumlah Kunjungan Wisatawan*. Retrieved from <https://gunungkidulkab.bps.go.id/Indicator/16/124/1/Jumlah-Wisawatan.Html>
- Donovon, F., & A., C. J. (1991). *Managing human service organization*. New York: Prentice Hall.
- Hanafi, M. (2022). Pengembangan Pariwisata Melalui Collaborative Governance di Kabupaten Magelang. *Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi*, 19(1), 1-17.
- Haqqi, S. (2022). *Natural Beauty Report*. Inggris: money.co.uk.
- Harian Jogja. (2024). *30 Persen Ruas Jalan Kawasan Wisata di Gunungkidul Butuh Perbaikan*. Yogyakarta: harianjogja.com. Retrieved from <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/01/16/513/1161650/30-persen-ruas-jalan-kawasan-wisata-di-gunungkidul-butuh-perbaikan>
- He, W., & Yue, X. (2023). Collaborative Governance in Desertification Control in China: A Case Study of Hobq Desert. *Sustainability*, 15(3).
- Jogya.com. (2019). *Raih 8 Penghargaan The Asian Post, DI Yogyakarta jadi Provinsi Terbaik*. Yogyakarta: Jogya.com. Retrieved from <https://jogya.com/raih-8-penghargaan-the-asian-post-di-yogyakarta-jadi-provinsi-terbaik/>
- Keban, Y. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

- Mali, M. G. (2021). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Era New Normal di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Aplikasi Visiting Jogja. *Destinesia: Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata*, 3(1), 1-11.
- Nurnathagotra, P., Santoso, R., & Warsono, H. (2023). Kolaborasi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Perkotaan di Kabupaten Lamongan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 652-667.
- Prastiyanti, D. P., & Yulianto. (2019). Media Promosi Pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 2(2), 174-184.
- Purwanto, Haryanti, N., & Raharjo, S. (2020). *Booklet 5 Pariwisata dan Pertambangan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bribin, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Romadhoni, A. N., & Prakoso, A. A. (2023). Ekowisata Telaga Jonge Pacarejo Gunungkidul. *Journal of Tourism and Creativity*, 7(2), 58-66.
- Romadhoni, A., & Prakoso, A. (2023). Ekowisata Telaga Jonge Pacarejo Gunungkidul. *Journal of Tourism and Creativity*, 7(2), 58-66.
- Sakro, A. (2020). Sumber Daya Bersama, Kontestasi, Hadirnya Spirit Berdesa: Studi Kasus Pengelolaan Telaga Jonge Desa Pacarejo, Kabupaten Gunungkidul. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(2), 200-221.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57-65.
- Sorot Gunungkidul. (2018). *Ramai Pengunjung, Jonge Jadi Wisata Berhias Sampah*. Gunungkidul: sorot.co. Retrieved from <https://gunungkidul.sorot.co/berita-95667-ramai-pengunjung-jonge-jadi-wisata-berhias-sampah.html>
- Sorot Gunungkidul. (2023). *Masuk Weekend, Uang Tidak Laku di Obyek Wisata ini*. Retrieved from [gunungkidul.sorot.co: https://gunungkidul.sorot.co/berita-107616-masuk-weekend-uang-tidak-laku-di-obyek-wisata-ini.html](https://gunungkidul.sorot.co/berita-107616-masuk-weekend-uang-tidak-laku-di-obyek-wisata-ini.html)
- Sugiarto, E. (2021). *Pengantar Ekowisata*. Grup Khitah Publishing.
- Sukarno, M., & Mutiarin, D. (2023). Branding tourism and collaborative governance: A case study from Nglanggeran village. *Jurnal Studi Komunikasi*, 7(3), 797-812.
- Sulastri, Myrna, R., & Isnawaty, N. (2022). Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang (Studi Narapidana dengan Masa Tahanan Lebih dari 1 Tahun). *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 188-196.
- Zaenuri, M. (2014). Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance. *Unisia*, 157-168.